



KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Kasubbag dan Seksi serta usulan dari berbagai pihak.

Renja Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra 2021-2026. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perang<mark>kat</mark> Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Renca<mark>n</mark>a <mark>Keg</mark>iatan dan Anggaran Kec<mark>a</mark>matan Embaloh Hulu Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahu<mark>n</mark> l<mark>alu</mark> dan perkiraan capaian ta<mark>h</mark>un berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instit<mark>usi bai</mark>k pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan p<mark>ela</mark>ksan<mark>aan kegiatan untuk T</mark>ahun 2024, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terimakasih.

> Banua Martinus, 11 Januari 2023 amat Embaloh Hulu

DRS. HERMANUS JEMAYUNG PUAS H

Pembina Tk. I

KECAMATAN EMBALOH HUL





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Lafar Belakang	I
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	5
1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	I EVALUASI PELA <mark>KSANA</mark> AN REN <mark>JA O</mark> PD TAHUN <mark>SEB</mark> ELUMNYA	
	SIL SIL	
2.1.	Evaluasi Pela <mark>ksana</mark> an Renja Skpd Tahun <mark>S</mark> ebelumnya dan	
	Capaian Renstra SKPD	7
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fu <mark>n</mark> gsi SKPD	9
2.4.	Review Terhadap RKPD	11
2.5.	Penelaahan U <mark>sulan</mark> Program dan Kegiatan Ma <mark>s</mark> yarakat	12
	CHILE	
BAB II	II TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN	
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	14
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja OPD	14
3.3.	Program dan Kegiatan	17
BAB I	V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HULU	J
BAB \	V PENUTUP	





BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Embaloh Hulu. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Embaloh Hulu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD Kecamatan Embaloh Hulu yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
- 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Embaloh Hulu sebagai wujud dari kinerja tahun 2018 ini merupakan





pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Landasan Hukum

Adapun yang menj<mark>adi L</mark>andasan Hukum Kecamat<mark>a</mark>n Embaloh Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebag<mark>a</mark>i berikut :

- 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);





- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;





- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 24. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Embaloh Hulu adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:





- Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Embaloh Hulu tahun 2024 dalam rencana program prioritas.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Embaloh Hulu yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Embaloh Hulu.

3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk:

- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026.
- Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
- Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Embaloh Hulu.
- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Embaloh Hulu.

4. Sistematika Penulisan Renja OPD

BABIPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG





- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
- 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
- 3.2. TUJUAN DAN SA<mark>S</mark>ARAN RENJA SKPD
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HULU

BAB V PENUTUP

BABII

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD





Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2023 SKPD Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2023. Hal ini akan terlihat dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2012 s/d Tahun 2023.

Untuk Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tersaji dalam **Tabel T-C.29**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Embaloh Hulu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Embaloh Hulu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran





- Meningkatynya sarana dan prasarana
- Meningkatnya disiplin aparatur
- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah
- Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM
- Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Keamanan
- Meningkatnya Pen<mark>in</mark>gkatan H<mark>asil</mark> Produksi Peternakan
- Meningkatnya pemeliharaan jalan dan jembatan
- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
- Meningkatkan peran serta kepemudaan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Embaloh Hulu yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Embaloh Hulu dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Embaloh Hulu sesuai Renstra Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Kapuas Hulu.

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2022 pada Satuan Kerja Kecamatan Embaloh Hulu memiliki pencapaian kinerja terrealisasi sebesar 100 % dan Belanja Langsung.





Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Embaloh Hulu (Lihat **Tabel T-C.30**)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Embaloh Hulu. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Embaloh Hulu sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Embaloh Hulu masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai,
- Sistem kerja yang belum optimal,
- Sumber daya manusia yang belum optimal,
- ❖ Kapasitas kelembagaan desa belum optimal, dan
- Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Embaloh Hulu, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan





kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Embaloh Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
- Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi styakeholder yang ada di Kecamatan Embaloh Hulu.

2.4. Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hulu berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Embaloh Hulu.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja





pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Embaloh Hulu yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Embaloh Hulu baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review in tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuantemuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (Lihat Tabel T-C.31)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau





indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat,
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
- Jumlah Penduduk,
- Tingkat Kemiskinan,
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
- PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan),
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2012 s/d tahun 2023 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri,





dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain:

- Pembangunan Bidang Pendidikan.
- Pembangunan Bidang Kesehatan.
- Pembangunan Bidang Ekonomi.
- ❖ Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tampak dalam (**Lihat Tabel T-C. 32**).







BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN EMBALOH HULU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Indentifikasi Kebijakan Nasional

Provinsi Kalimantan Barat

Nama SKPD: Kecamatan Embaloh Hulu

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
		- A	
		2 2	
	Cilir		

Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan





tujuan ini Kecamatan Embaloh Hulu telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangakan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan "Core Area" dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Embaloh Hulu menetapkan tujuan sebagai berikut:

NO	TUJUAN
Misi	1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
deng	gan pelayanan publik yang prima,
Misi 2	: Meningkatkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akun	tabel dengan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan.
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat





2	Meningkatkan	kinerja	penyelenggaraan	tugas	umum
	Pemerintahan Ke	ecamatan			

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu :

NO	SASARAN										
Tujua	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hulu										
2	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pmrintahan kecamatan										
	Embaloh Hulu										
Tujua	n: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum										
peme	emerintahan kecamatan										
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa										

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Embaloh Hulu merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam kontek ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu





dalam pencapaiannya masih sulit dilaksanakan karena perencanaan selalu tidak sejalan dengan ketersediaan keuangan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Ketidak sesuai ini biasanya disebabkan karena Pemerintah Daerah telah mematok angka anggaran untuk tiap-tiap kecamatannya. Dengan perkataan lain, hampir tidak mungkin melaksanakan Rencana Kerja tahun 2024 bahkan seterusnya sesuai dengan perancanaan.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya akan terpaparkan dalam (**Tabel T-C. 33**).







BABIV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HULU

Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Embaloh Hulu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Embaloh Hulu dan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud n<mark>yata dari tanggung jawab pemerintah dalam</mark> menciptakan tata k<mark>elola pemerintahan yang baik se</mark>suai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Kecamatan Embaloh Hulu adalah program tahunan Kecamatan Embaloh Hulu yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Kecamatan Embaloh Hulu. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Embaloh Hulu ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan





kegiatan pada Kecamatan Embaloh Hulu, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Tabel (Tabel 4.1) Berikut ini Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Embaloh Hulu untuk tahun 2024.





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Embaloh Hulu 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hulu sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Embaloh Hulu diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

KECAMATAN EMBALOH HULU

Banua Martinus, 11 Januari 2023

Camat Embaloh Hulu

PUAS DEMOINA TK. I

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Embaloh Hulu Tahun 2022 s/d Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu

Kantor Kecamatan Embaloh Hulu

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil	erja Hasil Tahun Lalu (n-2) Target Program dan kegiatan berjalan			aerah s/d tahun		
Kode	Daerah dan (outcomes)/ Perangkat Ke Program/Kegiata Kegiatan (output) Daerah) Tahun Kegi	Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	(Renja Perangkat Daerah tahun n- 1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01	URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,440,000	4,440,000	4,662,000	4,918,500	105.50	4,918,500	14,277,000	3,569,250
2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2,220,000	2,220,000	2,331,000	2,525,000	108.32	2,525,000	7,270,000	1,817,500
2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2,220,000	2,220,000	2,331,000	2,393,500	102.68	2,393,500	7,007,000	1,751,750
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,909,182,678	1,909,182,678	2,004,641,812	1,941,401,168	96.85	1,941,401,168	5,791,985,014	1,447,996,254

2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,832,439,078	1,832,439,078	1,924,061,032	1,864,219,168	96.89	1,864,219,168	5,560,877,414	1,390,219,354
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69,360,000	69,360,000	72,828,000	69,360,000	95.24	69,360,000	208,080,000	52,020,000
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akbir Tahun SKPD	7,383,600	7,383,600	7,752,780	7,822,000	100.89	7,822,000	23,027,600	5,756,900
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17,415,000	17,415,000	18,285,750	2,000,000	10.94	2,000,000	21,415,000	5,353,750
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	17,415,000	17,415,000	18,285,750	-	0.00	-	17,415,000	4,353,750
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203,666,000	203,666,000	213,849,300	195,927,000	91.62	195,927,000	595,520,000	148,880,000
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,500,000	2,625,000	2,668,000	101.64	2,668,000	7,836,000	1,959,000
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,389,000	19,389,000	20,358,450	17,119,000	84.09	17,119,000	53,627,000	13,406,750
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,500,000	2,500,000	2,625,000	1,980,000	75.43	1,980,000	6,460,000	1,615,000

2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,912,000	39,912,000	41,907,600	30,480,000	72.73	30,480,000	100,872,000	25,218,000
2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139,365,000	139,365,000	146,333,250	143,680,000	98.19	143,680,000	426,725,000	106,681,250
2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0		97,367,500	3,332,429,560	3422.53	3,332,429,560	6,664,859,120	1,666,214,780
2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	30,000,000	1,737,944,640	5793.15	1,737,944,640	3,475,889,280	868,972,320
2.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mebel	0	0	10,000,000	870,022,320	8700.22	870,022,320	1,740,044,640	435,011,160
2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,350,000	40,350,000	42,367,500	437,543,160	1032.73	437,543,160	915,436,320	228,859,080
2.07.11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	15,000,000	286,919,440	1912.80	286,919,440	573,838,880	143,459,720

2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,143,000	100,143,000	105,150,150	143,459,720	136.43	143,459,720	387,062,440	96,765,610
2.08.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,992,000	1,992,000	2,091,600	2,100,000	100.40	2,100,000	6,192,000	1,548,000
2.08.02	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,280,000	5,280,000	5,544,000	5,064,000	91.34	5,064,000	15,408,000	3,852,000
2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,871,000	92,871,000	97,514,550	136,295,720	139.77	136,295,720	365,462,440	91,365,610
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29,530,000	29,530,000	31,006,500	2,713,542,380	8751.53	2,713,542,380	5,456,614,760	1,364,153,690
2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,000,000	12,000,000	12,600,000	9,866,380	78.30	9,866,380	31,732,760	7,933,190

2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,530,000	17,530,000	18,406,500	12,540,000	68.13	12,540,000	42,610,000	10,652,500
		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	-	0	1,740,936,000	#DIV/0!	1,740,936,000	3,481,872,000	870,468,000
2.02	AAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	42,600,000	42,600,000	44,730,000	950,200,000	2124.30	950,200,000	1,943,000,000	485,750,000
1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42,600,000	42,600,000	44,730,000	501,700,000	1121.62	501,700,000	1,046,000,000	261,500,000
2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10,000,000	10,000,000	10,500,000	277,416,000	2642.06	277,416,000	564,832,000	141,208,000

2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,000,000	10,000,000	10,500,000	11,620,000	110.67	11,620,000	33,240,000	8,310,000
2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21,000,000	21,000,000	22,050,000	159,464,000	723.19	159,464,000	339,928,000	84,982,000
2.03.01		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21,000,000	21,000,000	22,050,000	53,200,000	241.27	53,200,000	127,400,000	31,850,000
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	28,912,000	28,912,000	30,357,600	53,132,000	175.02	53,132,000	135,176,000	33,794,000
2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	32,710,000	32,710,000	34,345,500	26,566,000	77.35	26,566,000	85,842,000	21,460,500

2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	30,066,000	30,066,000	31,569,300	26,566,000	84.15	26,566,000	83,198,000	20,799,500
2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2,644,000	2,644,000	2,776,200	0	0.00		2,644,000	661,000
						KECAMA EMBALOY	Basua Martinus, 11 Cargat Embaloh Hu	Januari 2023 Iu	

DRS HERMANUS JEMAYUNG

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu

				Tarç	get Renstra	Perangkat D	aerah	Realisas	i Capaian	Pro	yeksi	
No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP			CC	В	В	В	В	В	В	В	
2	Indek Kepuasan Masyarakat			76	76,5	77	7,5	76	76,5	В	В	
3	Prosentase Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dapat Direalisasikan			20%	21%	22%	23%	20%	21%	22%	23%	
4	Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tepat Waktu			80%	85%	90%	95%	80%	85%	90%	95%	
5	Persentase Desa yang mencapai target kinerja			60%	70%	80%	90%	60%	70%	80%	90%	
	target kinerja 60% 70% 60% 90% 60% 70% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 90% 60% 6											

TAPUAS HUDRS. HERMANUS JEMAYUNG Pembina Tingkat I

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kecamatan Embaloh Hulu

		R	ancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiat an	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Urusan	Kantor Camat EBU	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	2,600,000	Penunjang Urusan	Kantor Camat EBU	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	2,600,000	
2	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat EBU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,870,219,168	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat EBU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1,870,219,168	
3		Kantor Camat EBU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	7,822,000		Kantor Camat EBU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	7,822,000	
4		Kantor Camat EBU	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	100%	0		Kantor Camat EBU	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	100%	0	
5		Kantor Camat EBU	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	69,360,000		Kantor Camat EBU	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	69,360,000	
6		Kantor Camat EBU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2,668,000		Kantor Camat EBU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2,668,000	
7		Kantor Camat EBU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	17,119,000		Kantor Camat EBU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	17,119,000	
8		Kantor Camat EBU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	2,000,000		Kantor Camat EBU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	2,000,000	

9	Kantor Camat EBU	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	30,500,000	Kantor Camat EBU	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	30,500,000	
10	Kantor Camat EBU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	3,582,000	Kantor Camat EBU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	3,582,000	
11	Kantor Camat EBU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	150,000,000	Kantor Camat EBU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	150,000,000	
12	Kantor Camat EBU	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	0	Kantor Camat EBU	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	0	
13	Kantor Camat EBU	Pengadaan Mebel	100%	0	Kantor Camat EBU	Pengadaan Mebel	100%	0	
14	Kantor Camat EBU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	0	Kantor Camat EBU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	0	
15	Kantor Camat EBU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	0	Kantor Camat EBU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	0	
16	Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2,500,000	Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2,500,000	
17	Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	5,064,000	Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	5,064,000	
18	Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	136,295,720	Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	136,295,720	

19		Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	9,866,000		Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	9,866,000	
20		Kantor Camat EBU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	12,600,000		Kantor Camat EBU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	12,600,000	
21		Kantor Camat EBU	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	0		Kantor Camat EBU	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	0	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat EBU	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	0	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat EBU	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat EBU	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		11,000,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat EBU	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	11,000,000	
		Kantor Camat EBU	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		53,200,000		Kantor Camat EBU	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	53,200,000	

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Kantor Camat EBU	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintah	Kantor Camat EBU	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	47,000,000	
Ŭ	Kantor Camat EBU	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Camat EBU	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	16,859,880	

Banua Martinus, 11 Januari 2023

at Embaloh Hulu

HERMANUS JEMAYUNG Embina Tingkat I

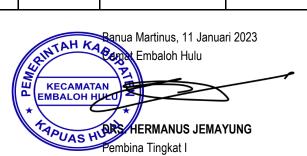
Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Embaloh Hulu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Camat EBU	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,600,000	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,870,219,168	
		Kantor Camat EBU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,822,000	
		Kantor Camat EBU	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	-	
		Kantor Camat EBU	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69,360,000	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,668,000	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,119,000	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,000,000	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,500,000	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,582,000	
		Kantor Camat EBU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000	
		Kantor Camat EBU	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	
		Kantor Camat	Pengadaan Mebel	-	
		Kantor Camat EBU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	

		Kantor Camat EBU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,064,000	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136,295,720	
		Kantor Camat EBU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9,866,000	
		Kantor Camat EBU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,600,000	
		Kantor Camat EBU	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Camat EBU	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	_	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat EBU	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11,000,000	
		Kantor Camat EBU	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	53,200,000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Kantor Camat EBU	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47,000,000	

5	Program Pembinaan dan	Kantor Camat	Koordinasi Pelaksanaan	16,859,880	
	Pengawasan Pemerintahan	EBU	Pembangunan Kawasan		
	Desa		Perdesaan di Wilayah		
			Kecamatan		



Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Embaloh Hulu

	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024					Maju Rencana un 2024
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat EBU	100%	2,600,000	APBD		100%	2,600,000
7.01.01.2.01.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat EBU	100%	1,870,219,168	APBD		100%	1,870,219,168
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat EBU	100%	7,822,000	APBD		100%	7,822,000
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kantor Camat EBU	100%	0	APBD		100%	0
7.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Camat EBU	100%	69,360,000	APBD		100%	69,360,000

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Camat EBU	100%	2,668,000	APBD	100%	2,668,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Camat EBU	100%	17,119,000	APBD	100%	17,119,000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat EBU	100%	2,000,000	APBD	100%	2,000,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Camat EBU	100%	30,500,000	APBD	100%	30,500,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Camat EBU	100%	3,582,000	APBD	100%	3,582,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat EBU	100%	150,000,000	APBD	100%	150,000,000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat EBU	100%	0	APBD	100%	0
7.01.01.2.1.5	Pengadaan Mebel	Kantor Camat EBU	100%	0	APBD	100%	0

7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat EBU	100%	0	APBD	100%	0
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Camat EBU	100%	0	APBD	100%	0
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Camat EBU	100%	2,500,000	APBD	100%	2,500,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Camat EBU	100%	5,064,000	APBD	100%	5,064,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Camat EBU	100%	136,295,720	APBD	100%	136,295,720
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Camat EBU	100%	9,866,000	APBD	100%	9,866,000

7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Camat EBU	100%	12,600,000	APBD	100%	12,600,000
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Camat EBU	100%	0		100%	0
7.01.02.2.02.03	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat EBU	100%	0		100%	0
7.01.03.2.01.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Camat EBU	100%	11,000,000		100%	11,000,000
7.01.03.2.03.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kantor Camat EBU	100%	53,200,000		100%	53,200,000

7.01.05.2.01.02	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	· ·	Kantor Camat EBU	100%	47,000,000	APBD	100%	47,000,000
7.01.06.2.01.18	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat EBU	100%	16,859,880	APBD	100%	16,859,880
Banua Martinus, 11 Januari 2023 KECAMATAN EMBALOH HULU								

DRS HERMANUS JEMAYUNG embina Tingkat I

TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Kantor Kecamatan Embaloh Hulu

Kode Program		Uraian	Jumlah Anggaran 2024	Target Program
1	2	3	4	5
7.01.01.2.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2,600,000	100%
7.01.01.2.01.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,870,219,168	100%
7.01.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,822,000	100%
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	-	0%
7.01.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	69,360,000	100%
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,668,000	100%
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,119,000	100%
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,000,000	100%
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,500,000	
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,582,000	100%
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000	100%
7.01.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	100%
7.01.01.2.1.5		Pengadaan Mebel	-	0%
7.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	100%
7.01.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	-	100%
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	100%
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,064,000	100%
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136,295,720	100%
7.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	9,866,000	100%
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,600,000	100%
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	100%

7.01.02.2.02.03	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	100%
7.01.03.2.01.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11,000,000	100%
7.01.03.2.03.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	53,200,000	100%
7.01.05.2.01.02	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	47,000,000	100%
7.01.06.2.01.18	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	16,859,880	100%



KECAMATAN EMBALOH HUL

TAPUAS HUDRS. HERMANUS JEMAYUNG Pembina Tingkat I